

KOMPAS, Minggu, 13 Februari 1994, 17

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

## Nasib "Pak Kanjeng", Nasib Kita

**L**ARANGAN resmi bagi kebebasan kesenian merupakan suatu kekejaman. Tapi masih lebih kejam lagi mencegah, mengintimidasi atau menekan orang bebas berkesenian pada saat tidak ada larangan resmi! Karena dalam situasi itu masyarakat ditipu oleh khayalan seakan-akan ada kebebasan kreatif. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, idealisme dan dana untuk suatu kesia-siaan.

Panitia dalam Forum Masyarakat Teater Surabaya (FMMS) menjadi korban utama dalam kasus di Surabaya. Mereka layak menerima dukungan masyarakat terdekat. Jika dibiarkan menderita sendirian, mereka atau pihak lain seperti mereka akan mati-selera dalam membina kesenian bermutu. Mereka kapok. Biarpun ada saat-saat lain yang lebih demokratis. Biarpun pejabat keamanan tidak lagi akan melarang.

Anak-anak yang lebih muda dan lebih kreatif daripada Emha Ainun Nadjib bisa enggan berkreasi seni. Kejadian di Surabaya ini bisa mendidik mereka untuk membunuh kreativitas sendiri, sehingga tak perlu ada aparat yang melarangnya. Kerugian dan korban musibah

budaya di Surabaya sulit diukur. Tidak sebatas Emha A. Nadjib, awak-pentas *Pak Kanjeng*, panitia, serta publiknya.

### Siapa yang bersalah?

Mudah bagi siapa pun untuk menuding aparat keamanan di Surabaya sebagai pihak paling bersalah dan penyebab berbagai kerugian di atas. Tanpa bermaksud membela mereka, kita perlu mengkaji gejala itu lebih mendalam. Ada yang menilai kejadian itu sebagai "cermin kesimpangsiuran" tata perizinan (*Kompas*, 3/2/94). Kita dapat memahaminya justru sebagai hal yang sangat logis.

Kebiasaan menyalahkan aparat keamanan bukan prasangka atau tuduhan liar tanpa alasan. Dasarnya jelas, mereka dimintai izin. Mereka menolak, menunda, atau membatalkan perizinan. Yang kita sering abaikan ialah dengan meminta perizinan kepada mereka, suatu panitia telah ikut memberikan pengakuan dan pembenaran bahwa instansi mereka punya wewenang dan wawasan lebih istimewa untuk menghakimi nasib dan keabsahan suatu karya seni.

Dalam *press release* tertang-

gal 31 Januari, awak-pentas *Pak Kanjeng* menyajikan sebuah otokritik: "Pak Kanjeng ... terlalu bersangka baik dalam menilai kejernihan berpikir, kedewasaan sikap dan kearifan politik penguasa Jawa Timur." Emha A. Nadjib merasa terlalu percaya pada janji Mensesneg bahwa tidak akan ada pelarangan pentas seni lagi (*Kompas*, 2/2).

Kita terlatih berpikir, kebebasan seni, ilmiah atau jurnalistik berasal dari dua sumber: kemurahan hati aparat keamanan untuk mengeluarkan izin dan janji-janji lisan warga negara yang kebetulan diangkat jadi pejabat negeri. Bila perizinan dari polisi dan militer diberikan lancar, maka kehidupan seni, ilmu, atau jurnalistik akan dianggap berjalan "normal".

Adanya persyaratan perizinan itu sendiri tidak digugat. Ketika izin tidak keluar, kita masih menyalahkan pihak yang telah ikut-ikutan kita junjung sebagai patron kebudayaan. Kita terbiasa menuduh mereka tak paham kesenian, atau tak menghargai demokrasi dan hak asasi. Seakan-akan ini hanya persoalan kesalahpahaman.

### Petugas jujur

Kita tak tahu persis mengapa izin pentas *Pak Kanjeng* di Surabaya macet. Tetapi sulit dipercayai pihak kepolisian atau militer di sana bergembira atau bangga karena batalnya pentas itu. Lebih mudah membayangkan mereka cekal pentas *Pak Kanjeng* dengan berat hati. Mengapa? Ketika kepada pers mereka menjelaskan kekhawatiran akan gangguan stabilitas, agaknya mereka bicara jujur.

Mungkin tidak banyak yang mempercayai alasan mereka. Kita perlu belajar membedakan antara (a) benar/tidaknya pentas *Pak Kanjeng* bisa mengganggu stabilitas, dan (b) benar/tidaknya aparat keamanan merasa takut pada dampak pentas itu bagi stabilitas. Seperti banyak pihak, saya tidak percaya pentas itu akan merongrong stabilitas. Tapi saya percaya para aparat Surabaya itu jujur ketika menyatakan rasa takutnya akan dampak pentas itu.

Petugas keamanan di mana pun tidak bertanggung jawab membantu kreativitas seni, kebudayaan, atau demokratisasi. Mereka hanya dihargai bila menjalankan instruksi atasan secara patuh. Masalahnya tidak

rumit seandainya ada instruksi tegas dari pusat agar pentas *Pak Kanjeng* diberi izin, atau harus ditolak. Petugas di daerah tinggal "menjalankan instruksi" dari pusat.

Masalahnya jadi lain ("tidak dilarang, tidak juga diizinkan"), apabila instruksi dari pusat tidak ada. Petugas daerah berkesempatan mengambil keputusan sendiri, tapi "kalau terjadi apa-apa" harus bertanggung jawab atas risikonya. Salahkah bila mereka menolak risiko apa pun untuk sesuatu yang memang bukan kewajibannya? Apalagi yang tidak menjanjikan pahala apa pun bagi korps maupun karier pribadi?

Berbagai kasus pencekalan karya seni, ilmiah atau jurnalistik mendorong kita membongkar akar persoalannya. Tidak pada soal teknis perizinan, atau mempersoalkan wawasan seni, atau ilmu birokrat perizinan. Mereka selayaknya dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab atas kegiatan seni budaya, dengan penghapusan persyaratan izin pentas seni. Aparatur negara dalam bidang keamanan atau apa pun pasti akan tanggap pada aspirasi rakyat, bila rakyat memang menjadi atasan mereka yang harus dipatuhi. \*\*\*

(Ariel Heryanto, pengajar Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga)